

## Pemberantasan Korupsi di Jepang –Harga Diri dan Budaya Malu

Ramadhani Ardiansyah

D IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Bintaro

email: ramadhani.ardiansyah@gmail.com

**Abstrak** – Japan, now become the leading countries in Asia along with China, is one of the few country in Asia with outstanding anti-corruption performance, economic, human resources quality, living standard, infrastructure and even judicial system. Japan, along with United Kingdom, was recently ranked 17th on Transparency International (TI)'s Corruption Perceptions Index in 2012. Even though Japan is famous for its culture of pride and shame that affect a lot in the war against corruption, still there is society reluctance to become whistle-blower for corruption cases and also the existence of amakudari. Not to mention there is no specific law regulating about corruption, resulting in insignificant punishment for the corruptors.

This paper is compiled from various references from the internet. The content stressed on the efforts on fight against corruption in Japan.

**Kata Kunci:** *Jigyoku Shiwake, budaya malu, bunuh diri, whistle-blower, amakudari*

### 1. Pendahuluan

*“When honor and the Law no longer stand on the same side of the line, how do we choose?”*

— [Anne Bishop](#), *Heir to the Shadows*

Sejarah telah membuktikan bahwa korupsi sangatlah susah untuk dikendalikan. Akan selalu ada celah dalam sistem kekuasaan yang memungkinkan orang-orang dengan ketamakan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kedudukan mereka. Sebelum membahas lebih jauh tentang upaya pemberantasan korupsi, ada baiknya jika kita berangkat dari pemahaman yang sama tentang konsep korupsi terlebih dahulu.

Korupsi menurut undang-undang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, dan sering terjadi ketika kepentingan umum dan kepentingan pribadi bertemu. bisa sangat luas mengingat korupsi bisa terjadi di semua aspek. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..”.

Menurut Wikipedia, Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak dan busuk. “Korup” juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga dikatakan berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang bisa diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, *corruptio* berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum.

Jepang merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Jepang terletak di bagian barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Jepang serta bertetangga dengan Republik Rakyat China, Korea, Rusia dan Taiwan. Jepang memiliki 6,852 pulau, dengan 4 (empat) pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Ibu kota Jepang, Tokyo, terletak di pulau

Honshu. Jumlah penduduk Jepang pada tahun 2010 adalah 127.500.000 jiwa. Sistem negaranya adalah Monarki Konstitusional dimana Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara seremonial, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen.

Perekonomian Jepang sangat kuat karena industrinya yang sangat maju sehingga banyak produk industri Jepang yang mendunia. Pendapatan Domestik Bruto Jepang tahun 2012 yaitu sebesar \$5,976 milyar dan mewakili 9,61% dari perekonomian dunia. Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi juga dilakukan dengan baik sehingga berhasil menjadikan kota Tokyo menjadi salah satu kota metropolitan dengan sarana transportasi yang sangat baik. Untuk tingkat pemberantasan korupsi, Jepang juga lebih baik dari negara-negara lain, walaupun di kawasan Asia masih tertinggal dari Singapura (Peringkat 5) dan Hongkong (Peringkat 14). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan *Transparency International*, pada tahun 2012, Jepang bersama dengan Inggris mendapatkan skor 74 dari nilai maksimal 100 dengan peringkat 17 dari total 176 negara yang diteliti oleh *Transparency International*.

## 2. Pembahasan

Jepang tidak memiliki lembaga khusus maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi seperti yang ada di beberapa Negara tetangganya di Asia. Dalam sistem hukum Jepang, Korupsi disamakan perlakuannya seperti tindak pidana umum. Korupsi digolongkan menjadi penyuapan, penggelapan uang negara dan penipuan, dimana hukuman maksimalnya hanya tujuh tahun hukuman kurungan.

Berhasilnya pemerintahan Jepang dalam membersihkan institusi dan menang dalam perang melawan korupsi tidak lepas dari

dukungan masyarakat dan dengan budaya malu yang kuat. Walaupun tidak ada undang-undang maupun lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi, namun berdasarkan data yang dihimpun oleh *Transparency International*, Jepang termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya penegakan hukum “malu”. Budaya penegakan hukum “malu” jauh lebih efektif daripada ancaman hukuman yang berat. Di Jepang budaya inilah yang menjadi senjata utama dalam pencegahan korupsi. Di Jepang, politisi dan pejabat pemerintah yang baru diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi akan langsung mengundurkan diri tanpa diminta. Bahkan banyak diantaranya yang langsung mengakui kesalahannya sebelum dibawa ke pengadilan. Pengacara yang menangani kasus korupsi juga menyarankan klien mereka untuk segera mengaku apabila memang bersalah agar mendapatkan keringanan hukuman. Media di Jepang juga berperan penting dalam menyebarkan berita korupsi sehingga masyarakat langsung tahu dan menciptakan tekanan publik agar orang yang dinilai korup segera mundur

Sejak tahun 2009 pada saat Perdana Menteri Hatoyama menjabat, pemerintah menerapkan metode baru pemberantasan korupsi. Perdana Menteri Hatoyama membentuk sebuah badan khusus untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di Jepang yaitu *Jigyō Shiwake* atau *Government Revitalisation Unit*. Lembaga ini bertugas memeriksa semua lembaga pengguna anggaran negara dan memastikan bahwa tidak ada uang negara yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semua anggaran pengeluaran yang dikeluarkan lembaga negara diperiksa, apabila memang ada pos anggaran atau proyek yang tidak wajar maka *Jigyō Shiwake* mengadakan rapat dengan pimpinan lembaga terkait. Dari hasil rapat tersebut *Jigyō Shiwake* menentukan apakah pos pengeluaran maupun proyek tersebut boleh

diteruskan, dipotong anggarannya atau dihentikan. Semua proses rapat pembahasan anggaran oleh *Jigyoku Shiwake* ini bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Jepang melalui live streaming di internet. Dengan adanya *Jigyoku Shiwake*, proses serta hasil rapat yang bisa diakses luas oleh masyarakat maka tingkat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran meningkat sehingga mengurangi celah terjadinya korupsi.

Walaupun tingkat korupsinya rendah, bukan berarti Jepang bebas dari korupsi. Berikut ini beberapa kasus korupsi yang telah berhasil terungkap di Jepang:

- a) *Lockheed Scandal*  
Kasus ini terungkap pada Februari 1976, kasus ini melibatkan perusahaan produsen pesawat tempur asal Amerika Serikat, Lockheed dan sejumlah pejabat penting Jepang termasuk Perdana Menteri kala itu Kakuei Tanaka. Petinggi Lockheed telah terbukti memberikan sejumlah uang kepada Kakuei Tanaka dan pejabat lainnya sebagai imbalan atas keputusan pembelian pesawat buatan Lockheed.
- b) *Recruits Scandal*  
Kasus ini adalah kasus suap dimana sebanyak 70 politisi dari Liberal Democratic Party (LDP) membeli saham dari perusahaan Jepang yang bernama Recruits. Kasus ini terungkap pada tahun 1988 dan berimbas pada mundurnya Perdana Menteri Jepang yang juga menjabat pimpinan LDP saat itu, Noboru Takeshita. Salah satu ajudan dari Noboru Takeshita melakukan bunuh diri tidak lama setelah kasus ini terungkap, diduga kuat dilakukan untuk melindungi informasi mengenai kasus lain yang melibatkan Noboru Takeshita.
- c) *Ministry of Finance Sex and Money Scandals*  
Terdiri dari beberapa kasus, dimana sejumlah pegawai Kementerian Keuangan Jepang menerima suap berupa uang maupun pelayanan sex dari para wanita panggilan yang diberikan oleh pihak swasta.
- d) *Construction Corruption*  
Proyek konstruksi dalam rangka pembangunan yang dilakukan setiap tahun bernilai sangat besar

sehingga sering menjadi lahan korupsi, terutama pada proses penunjukan perusahaan pelaksana proyek. Praktik yang umum terjadi adalah perusahaan konstruksi berlomba-lomba merekrut para pensiunan birokrat yang selama masa kerjanya banyak berkecimpung di proyek konstruksi pemerintahan demi melancarkan upaya memenangkan persaingan untuk memperoleh hak pelaksanaan proyek. Salah satu perusahaan konstruksi Jepang berpusat di Osaka, *Kinki Regional Development Bureau* yang selama ini dikenal sering mendapatkan proyek konstruksi berhasil besar diketahui memperkerjakan 1.000 orang pensiunan dari Kementerian Konstruksi dan Transportasi Jepang.

- e) *Bid Rigging Scandal*  
Pengaturan penawaran lelang dalam proses pengadaan juga sering terjadi di Jepang. Praktik yang terjadi pemenang lelang proyek pemerintah hanyalah perusahaan-perusahaan tertentu yang bergabung dalam kartel-kartel besar. Pada tahun 2006 sebanyak 3 orang Gubernur Prefektur meletakkan jabatannya karena terkait Bid Rigging Scandal.

Walaupun beberapa kasus korupsi di Jepang berhasil terungkap, tetapi kasus tersebut seringkali tidak dapat diungkap dengan tuntas. Hal ini disebabkan karena kecenderungan orang Jepang yang tidak mau menjadi *whistle-blower*. Membeberkan kejahatan yang dilakukan yang dilakukan oleh atasan maupun organisasi yang menaungi mereka merupakan hal yang tabu sebagian besar orang Jepang. Selain itu, seringkali tersangka korupsi melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi tekanan, seperti tindakan bunuh diri yang dilakukan Yoichi Otsuki, seorang pejabat Kementerian Keuangan Jepang pada tahun 1998. Yoichi Otsuki menggantung dirinya tidak lama setelah kepolisian Jepang melakukan penggeledahan di apartemennya mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi yang diduga terjadi di lembaganya. Dengan tersangka yang sudah bunuh diri otomatis menghambat pihak berwenang untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi lebih jauh.

Hal lain yang menjadi masalah yaitu “*amakudari*” yang apabila diartikan secara harfiah bermakna “turun dari surga”. Para pejabat dan pegawai yang dipaksa untuk pensiun pada usia 65 tahun, “turun” ke lapangan pekerjaan di sektor swasta dimana mereka akan menjalin hubungan erat dengan kolega mereka semasa kerja agar dapat melakukan lobi yang menguntungkan perusahaan mereka. Sepaham dengan itu, kolega yang masih di dalam lingkungan pemerintahan juga memberikan mereka keistimewaan dalam bidang peraturan agar ikut serta memperoleh keuntungan. Masalah ini juga sangat susah dihadapi karena apabila “*amakudari*” ini dilarang maka sama saja dengan menghilangkan kesempatan masing-masing individu untuk bekerja secara bebas, namun apabila dibiarkan dapat membuat negara hancur.

### 3. Kesimpulan

Walaupun Jepang tidak memiliki lembaga maupun undang-undang khusus tentang pemberantasan korupsi, tingkat korupsi yang terjadi di Jepang tergolong rendah. Hal ini disebabkan adanya budaya penegakan hukum “malu”. Di Jepang budaya penegakan hukum “malu” ini jauh lebih efektif dari hukuman yang berat dalam pemberantasan korupsi. Media juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarluaskan berita korupsi. Beberapa kasus korupsi di Jepang berhasil diungkap akan tetapi seringkali tidak bisa diungkap secara penuh karena, pertama, kecenderungan orang Jepang tidak mau menjadi *whistle-blowers* dan kedua, orang yang sedang diselidiki dalam kasus korupsi seringkali melakukan tindakan bunuh diri. Sejak tahun 2009 pemerintah Jepang

mendirikan *Jigyō Shiwake* atau *Government Revitalisation Unit*, lembaga negara ini diharapkan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran di pemerintahan Jepang.

### DAFTAR REFERENSI

- [1] **Wikipedia**, *Jepang*,  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang>
- [2] **Wikipedia**, *Economy of Japan*,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Japan](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan)
- [3] **Achmad Ali**, *Bercermin pada Penegakan Hukum Jepang*,  
<http://angelinasinaga.wordpress.com/2013/04/30/bercermin-pada-penegakan-hukum-jepang/>
- [4] **Wikipedia**, *Political Scandals in Japan*  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Political\\_scandals\\_in\\_Japan](http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Political_scandals_in_Japan)
- [5] **Jeffreys Hays**, *Corruption and Government Scandals in Japan*,  
<http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=799&>
- [6] **Fumi Yamazaki**, *Jigyō Shiwake in Japan*,  
<http://fumijp.blogspot.com/2010/04/jigyō-shiwake-in-japan.html>
- [7] **Rose-Ackerman, S.**, “*The Political Economy of Corruption*”. In K.A. Elliot (Ed). *Corruption and the Global Economy*, Washington: Institute for International Economics. 1997. Hal 31-60
- [8] **Transparency International**  
<http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/>
- [9] **Farodlilah**, *Kontrol Sosial Jepang Jadi Roh Pemberantasan Korupsi*  
<http://www.antikorupsi.org/en/content/kontrol-sosial-jepang-jadi-roh-pemberantasan-korupsi>
- [10] **John C. Campbell**, “*Democracy and Bureaucracy in Japan*.” in Ishida, Takeshi and Ellis S. Krauss, eds. *Democracy in Japan*.

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1989

<http://www.asahi-net.or.jp/~zj5j-gttl/s980403.htm>